

PERANAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) DALAM UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU

oleh: Tri Murwaningsih *)

Abstrak

Masalah tenaga pendidikan di Indonesia selama ini antara lain adalah rendahnya kualitas dan profesionalisme guru, rendahnya kemandirian guru dalam melaksanakan profesinya yang berakibat rendahnya mutu pendidikan. Untuk meningkatkan profesionalisme guru perlu diupayakan peningkatan kualifikasi, kompetensi, wawasan keilmuan, serta kesejahteraan guru. Profesi guru dilegitimasi oleh masyarakat pengguna untuk itu guru dituntut menguasai didaktik dan metodik, serta menguasai substansi keilmuan yang menjadi kompetensinya. Guru profesional dituntut selalu meningkatkan profesionalisme, serta kemampuan, pengetahuan dan wawasan keilmuannya secara berkelanjutan. Profesi guru harus merupakan profesi mandiri dan memiliki komunitas profesional yang selalu berkembang. Peranan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), sebagai organisasi profesi guru, diharapkan lebih proaktif dalam memperjuangkan perbaikan kesejahteraan, citra, serta meningkatkan profesionalisme guru. Organisasi profesi ini didambakan dapat menunjukkan citra sebagai motor penggerak dan wadah penampung semua aspirasi profesionalisme

guru dan berperan aktif memotivasi peningkatan kualitas guru.

Kata kunci: profesi kependidikan, profesionalisme guru.

Pendahuluan

Guru merupakan faktor kunci dalam keberhasilan proses pembelajaran, oleh karenanya masalah tenaga pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil proses belajar mengajar. Masalah klasik dalam tenaga kependidikan di Indonesia selama ini adalah kekurangan tenaga guru, distribusi guru tidak merata, kualitas guru pas-pasan, motivasi guru minimum, serta tingkat kesejahteraan guru yang masih rendah. Keadaan ini diperparah lagi dengan keterbatasan keterampilan dan kemandirian guru dalam melaksanakan profesinya atau dengan kata lain rendahnya kualitas dan profesionalisme guru. Kenyataan ini jelas berdampak buruk pada keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah (Badarudin, 2002: 37).

Melihat kenyataan pada kebanyakan guru sekolah dasar (SD) dewasa ini, motivasi dari para guru masih perlu untuk terus didorong agar bersikap aspiratif dan

*) Tri Murwaningsih adalah guru SDN Samirono I, Depok Sleman

akomodatif dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi di masyarakat. Gejala lain yang jelas terlihat adalah kecenderungan kurang-mandirian guru dalam menjalankan profesinya sebagai tenaga pendidik. Profesionalisme serta kemandirian guru dalam menjalankan profesinya perlu ditumbuh-kembangkan pada setiap kegiatan proses belajar mengajar di sekolah (Salim, 2003: 5).

Kondisi sekarang sudah diketahui bersama bahwa kualitas akademik institusi pendidikan di Indonesia, termasuk juga sekolah dasar, umumnya rendah (Salim, 2003: 5). Rendahnya kualitas akademik tersebut salah satunya adalah sebagai akibat institusi sekolah kurang memiliki kewenangan apapun, kecuali hanya menjadi pelaksana kebijakan pendidikan semata. Kualitas guru yang rendah selalu dituding menjadi penyebab utama rendahnya mutu pendidikan di sekolah-sekolah kita. Walaupun sekarang di SD sudah diberlakukan program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) namun dalam kenyataan hasilnya belum tampak jelas. Dalam MPMBS sekolah memiliki kewenangan untuk menyiasati kurikulum yang berlaku agar sesuai dengan kondisi sekolah, termasuk tuntutan masa depan akan pentingnya program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) bagi siswa. Dalam MPMBS dikenal lima prinsip dasar, yaitu kemandirian, transparansi, kerjasama, akuntabilitas dan sustainabilitas. Oleh karena itu, bila lima prinsip MPMBS dapat dikembangkan menjadi budaya kerja sekolah, akan terjadi pertumbuhan kecakapan hidup para siswa peserta didik (Najid, 2003: 19-20). Semangat dari MPMBS adalah kebe-

basan dan kreativitas yang akan sangat menentukan keberhasilan sekolah dalam usaha menghasilkan pribadi berkualitas serta sangat dibutuhkan saat ini untuk perbaikan kualitas hidup generasi mendatang (Widayati, 2002: 83). Rendahnya kualitas guru-guru SD juga menjadi kendala utama dalam kurang optimumnya hasil penerapan MPMBS di sekolah-sekolah (Salim, 2003: 5), sehingga berakibat belum tampaknya keberhasilan program ini.

Dalam konteks otonomi sekolah, keberhasilan pendidikan mensyaratkan terselenggaranya proses pembelajaran berlangsung secara efektif, aktif dan menyenangkan. Artinya, waktu pelajaran yang ada mestinya harus dipergunakan sepenuhnya oleh guru dan murid dalam melakukan proses belajar mengajar. Jika dalam kelas terdapat siswa yang lambat belajarnya, guru dengan senang hati harus membimbing sampai murid tersebut dapat menguasai bahan ajar yang diberikan. Kenyataan yang ada sekarang, banyak guru yang mengajar kurang baik, proses belajar mengajar berlangsung kurang menarik dan cenderung membosankan (Suryono, 2002: 16). Jam efektif mengajar banyak digunakan oleh guru-guru untuk mengurus hal-hal administratif, termasuk kegiatan kelompok kerja guru dan kegiatan guru lainnya yang berlangsung pada jam-jam efektif sekolah. Guru tidak efektif dalam menggunakan waktu untuk proses kegiatan belajar mengajar, lebih banyak konsentrasi dan waktunya terbuang untuk mengerjakan pekerjaan lain sebagai persyaratan administratif, seperti penulisan satuan pelajaran (SP) atau pekerjaan administratif lain. Guru mestinya punya perhatian dan waktu yang

cukup untuk melakukan pendampingan pembelajaran pada semua anak didik. Guru akan dapat meratakan pendampingan pada setiap peserta didik, sampai mereka sungguh-sungguh memahami materi pelajaran sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dengan demikian, ada tuntutan bagi guru untuk mengenal, memperhatikan dan memahami benar kompetensi anak didik dalam setiap kegiatan pembelajaran (Salim, 2003: 5).

Kualitas dan kualifikasi guru yang umumnya rendah memang sudah lama dirasakan oleh banyak kalangan. Upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan kualifikasi guru merupakan langkah yang harus didukung, misalnya untuk guru sekolah dasar didorong untuk ikut program penyeteraan Diploma II PGSD atau program penyeteraan lainnya. Kualifikasi guru sekolah dasar minimum lulusan D II PGSD akan lebih menjamin tersedianya tenaga kependidikan yang lebih berkualitas dan lebih mudah menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Program D II tersebut memang tidak serta merta meningkatkan kualitas guru, namun paling tidak merupakan dorongan motivasi kepada para guru untuk terus menerus meningkatkan profesionalisme dan menambah wawasan keilmuan, kualitas dan kualifikasinya (Tilaar, 2002: 68).

Kepada para guru perlu dilakukan pembinaan kompetensi dan profesionalisme, sehingga mereka menguasai kurikulum dan silabus, substansi mata pelajaran, metode belajar, teknik evaluasi, memiliki komitmen yang kuat dalam mendidik, serta memiliki disiplin dalam arti yang luas. Guru

harus memiliki komitmen yang kuat untuk selalu meningkatkan kualitas diri, mengupayakan perubahan dan perbaikan proses belajar mengajar secara terus menerus. Suryono (2002: 15) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar tentu saja membutuhkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang memadai. Sarana dan prasarana yang dimaksud termasuk buku ajar, majalah, fasilitas perpustakaan, alat peraga, laboratorium, alat bantu audio-visual, serta sarana penunjang pendidikan lain. Selanjutnya dinyatakan bahwa kenyataannya kebanyakan SD tidak memiliki sarana dan prasarana pendidikan memadai untuk kegiatan belajar mengajar yang ideal. Tanpa sarana dan prasarana pendidikan yang layak akan sulit untuk mengembangkan kemandirian sekolah dan profesionalisme guru pada sekolah yang bersangkutan. Kurikulum berbasis materi, yang masih berlaku sampai sekarang, umumnya membuat guru menjadi pasif, kurang mandiri dan kurang kreatif dalam pengembangan kegiatan belajar mengajar. Kenyataan ini membuat kurangnya iklim kompetitif dari hasil pembelajaran sekolah dasar (Suryono, 2003: 17-18).

Profesionalisme Guru dan Guru Profesional

Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*expertise*) dari para anggotanya. Pekerjaan mendidik sebagai profesi didasarkan pada asumsi bahwa subyek pendidikan adalah manusia, pendidikan dilakukan secara sadar dan bertujuan, dilaksanakan berdasarkan teori-teori pendidikan, pendidikan merupa-

kan usaha mengembangkan potensi manusia, inti pendidikan terjadi dalam prosesnya, tujuan utama pendidikan menjadikan manusia sebagai manusia yang baik (Anonim, 1992: 5). Seorang profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi dan berdasarkan profesionalisme. Profesionalisme berarti menjadikan atau mengembangkan suatu bidang pekerjaan atau jabatan secara profesional. Dalam proses profesionalisasi yang dituju adalah produktivitas kerja tinggi dan kemandirian menjalankan profesinya (Tilaar, 2002: 86-87).

Pendidikan harus dilakukan secara profesional, sehingga konsekuensinya diperlukan upaya sistematis dalam rangka profesionalisasi tenaga kependidikan. Guru profesional akan mampu menumbuhkan dan mengembangkan ide-idenya, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pembelajaran pada siswanya agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Guru profesional akan bertindak kreatif, inovatif dan fleksibel dalam setiap proses pembelajaran, serta tidak hanya berpegang secara kaku pada kurikulum yang berlaku. Guru profesional bukan hanya tahu banyak, tetapi juga bisa banyak. Guru ideal tentunya mempunyai tingkat kemandirian dan standar profesionalisme yang tinggi (Sukmadinata, 1992: 60-61).

Guru yang mandiri diharapkan semakin dapat memikirkan apa yang paling baik untuk dilakukan, demi kemajuan proses belajar mengajar dan pendidikan. Di samping itu, guru hendaknya mampu melihat situasi yang nyata di lingkungan, sekolah, kelas dan anak didik; berani melaksanakan apa yang dipikirkan,

dituangkan dalam bentuk proses pembelajaran; dapat mengevaluasi apa yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran; mempunyai konsep, kreatif dan berani berinisiatif dalam melakukan proses pembelajaran dan memiliki strategi pembelajaran (Sukmadinata, 1992: 62).

Guru yang aktif memikirkan, mengembangkan kurikulum bahan ajar, metode pendekatan yang digunakan agar lebih efektif membantu siswa berkembang. Guru kreatif tidak hanya puas dengan apa yang diperoleh, tetapi selalu ingin mencari-cari bahan, sumber lain, sehingga bahan dapat dikembangkan dengan baik, mau menerima tantangan yang ada agar tidak ketinggalan jaman. Guru diharapkan juga menjadi seorang pemikir dan intelektual yang terus menerus mau belajar, mencari dan mengembangkan pengetahuannya maupun wawasan keilmuannya. Guru yang kritis tidak hanya asal ikut-ikutan saja, tetapi melihat, menilai apakah aturan itu baik dan cocok untuk memajukan sekolahnya. Guru sebagai kaum intelektual harus bersikap kritis terhadap kurikulum dan berusaha untuk mengembangkannya (Tilaar, 2002: 122-124).

Untuk menumbuh-kembangkan kemandirian dalam melaksanakan profesinya guru dituntut mempunyai kebebasan intelektual, bebas berpikir dan mengembangkan pikirannya. Guru harus pula memiliki visi ke depan jika ingin memajukan kebebasan berpikir pada siswanya. Di samping itu, guru perlu keberanian untuk bertindak sendiri, tidak harus terpaku pada aturan main dan mampu mengembangkan kemampuan berrefleksi terhadap apa yang dilakukan. Situasi yang selalu berubah itulah yang diperlukan keberanian untuk

mengambil keputusan secara mandiri (Tilaar, 2002: 125-126).

Peningkatan Profesionalisme Guru

Pengembangan tenaga guru di masa mendatang diarahkan untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme. Peningkatan kesejahteraan guru perlu terus menerus diupayakan, untuk lebih menjamin kualifikasi dan profesionalisme guru. Peningkatan kesejahteraan guru perlu dilakukan agar dapat hidup layak, bermartabat, serta meningkatkan kualitas diri melalui membaca koran, membeli buku, majalah, komputer, dan dapat melanjutkan jenjang studinya (Tilaar, 2002: 86).

Dengan adanya Otonomi Daerah terjadi pula tuntutan atas otonomi di sektor pendidikan, berupa wacana baru pengadaan guru. Dulu profesi guru dilegitimasi oleh pengakuan pemerintah, kini harus dilegitimasi oleh masyarakat pengguna (*stake holders*). Guru merupakan profesi yang terbuka, harus diuji oleh masyarakat, dikritisi dengan standar performans dengan tolok ukur yang jelas. Menjadi guru yang profesional, tidak tergantung penguasaan didaktik dan metodik saja, namun mencakup substansi yang selalu berubah. Guru merupakan milik masyarakat, kelompok guru adalah komunitas yang bersifat dinamis dan terus berkembang. Guru profesional selalu meningkatkan kemampuannya, berkelanjutan sesuai dengan penguatan basis masyarakat lokal. Profesi guru adalah profesi mandiri, tidak tergantung lembaga pemegang kekuasaan negara, tetapi memiliki komunitas profesional yang modern (Tilaar, 2002: 86).

Di masa depan, guru adalah profesi mandiri. Keberadaan guru ditentukan oleh 4 elemen utama yang bersifat dinamis, yaitu lembaga sekolah, lembaga profesi, masyarakat dan pemerintah (Tilaar, 2002: 86-87). Selanjutnya diuraikan, *pertama*, proses desentralisasi pendidikan di tingkat daerah (lokal) yang pada dasarnya adalah proses pemberian otonomi kepada lembaga sekolah. Pemberian otonomi ini merupakan upaya privatisasi yang menjadi acuan peningkatan kematangan lembaga sekolah. Tingkat kematangan lembaga sekolah akan menentukan kualitas dan akumulasi guru yang terdapat di dalamnya. *Kedua*, dibutuhkan adanya organisasi profesi guru yang memiliki kemampuan dan wibawa untuk memberikan legitimasi bagi profesi guru. Guru menjadi profesi terbuka, dapat dimasuki oleh berbagai disiplin ilmu, tetapi profesi guru membutuhkan kelembagaan yang dapat dipercaya untuk memberikan jaminan dalam meningkatkan keahliannya. Guru perlu memiliki kemampuan didaktik dan metodik, serta harus menguasai substansi ilmu pengetahuan yang menjadi tanggung jawab profesinya. *Ketiga*, masyarakat adalah penyumbang utama peningkatan kualitas lembaga sekolah dan juga penentu kebijakan pemilihan tenaga guru di lembaga sekolah. Masyarakat merupakan pasar yang sangat menentukan adanya akumulasi penawaran tenaga guru dan kualifikasi jumlah guru yang dibutuhkan. *Keempat*, pemerintah pusat mulai memberi wewenang dalam upaya mengadakan guru kepada pemerintah daerah. Kondisi ini meneguhkan posisi masyarakat lokal guna mengelola kebutuhan dalam rangka mencukupi

kebutuhan guru di lembaga sekolah (Tilaar, 2002: 86-87).

Sebagai pendidik, guru dituntut untuk bersikap kreatif dan inovatif terutama dalam mengelola kelas, sehingga anak didik merasa nyaman dalam belajar, namun hal itu biasanya kurang disadari oleh para guru. Kalau guru hanya datang untuk menyampaikan materi tanpa ada variasi atau strategi khusus dalam pembelajaran, bisa dipastikan bahwa anak didik akan merasa jenuh, bosan dan ujung-ujungnya bisa menjadikan mereka enggan belajar. Untukantisipasi hal tersebut, guru diharapkan bisa menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain dengan mengikuti penataran, pelatihan, kursus, seminar dan kegiatan lainnya. Guru diharapkan pula aspiratif terhadap kemajuan teknologi, utamanya teknologi informasi, misalnya penggunaan komputer dan internet untuk kegiatan belajar mengajar. Dengan selalu mengikuti perkembangan teknologi, diharapkan guru tidak mengalami "gagap teknologi" dan ketinggalan jaman, karena para peserta didik akan semakin intensif menggunakan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-harinya. Menurut Tilaar (2002: 122-124) tugas seorang guru profesional meliputi tiga bidang utama: 1) dalam bidang profesi, 2) dalam bidang kemanusiaan, dan 3) dalam bidang kemasyarakatan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa guru yang profesional dapat mengadakan evaluasi di dalam proses belajar mengajar, membimbing peserta didik untuk mencapai tujuan program belajar mengajar. Selain itu, seorang guru profesional merupakan seorang administrator, baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam

kemampuan manajerial dalam lingkungan sekolah. Sebagai pendidik, seorang guru profesional adalah seorang komunikator. Sebagai profesi yang terus berkembang, seorang guru profesional hendaknya mampu mengadakan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan peningkatan profesionalisme seorang pendidik (Tilaar, 2002: 89-90).

Peranan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Profesionalisme Guru

Dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru, peranan kepala sekolah sangat penting, seperti yang dipaparkan oleh Suparno (2003: 4). Kepala sekolah perlu memberikan kebebasan kepada para guru untuk berinisiatif, berpikir, mengembangkan pembelajaran di bidang yang dikelolanya. Kepala sekolah harus memberikan kebebasan kepada para guru untuk ikut berbicara, demi kemajuan proses belajar mengajar di sekolah. Lebih-lebih dengan adanya otonomi sekolah, peranan guru diharuskan mau menghadapi tantangan, bersaing dengan sekolah-sekolah lain dan nyata-nyata menjadi ujung tombak keberhasilan pendidikan. Kerjasama antara sekolah dan masyarakat, termasuk Komite Sekolah, sangat dibutuhkan demi keberlangsungan sekolah itu sendiri (Suparno, 2003: 4). Guru perlu diberi peluang untuk mengembangkan bahan, metode, evaluasi, serta pembuatan soal untuk ujian sumatif bahkan sampai soal ujian akhir sekolah. Guru juga harus diberi kesempatan untuk ikut aktif dalam aktivitas manajemen sekolah dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Bila kepala sekolah bersikap apriori, maka

pembaharuan dan reformasi pendidikan serta kemandirian guru tidak akan pernah tercapai. Kepala sekolah diharapkan mengerti pendidikan secara menyeluruh, bersifat terbuka terhadap perubahan dan pembaharuan, terbuka terhadap semua hal, selalu meluangkan waktu untuk menambah wawasan, memahami visi dan misi sekolah, melibatkan semua guru untuk memikirkan pengembangan dan kemajuan sekolah, membangun relasi yang baik dengan semua guru. Bila kepala sekolah bersikap seperti tersebut di atas, maka diharapkan akan lebih aspiratif, akomodatif dan menambah motivasi terhadap peningkatan profesionalisme dan kemandirian guru (Tilaar, 2002: 92-93).

Peranan PGRI dalam Peningkatan Profesionalisme Guru

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), merupakan organisasi profesi guru terbesar di Indonesia. Seperti organisasi profesi lainnya, PGRI bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya dalam bidang profesinya, serta melindungi hak dan kewajiban guru sebagai anggota profesi. Organisasi profesi ini memang belum berhasil menunjukkan kemampuannya dalam memperjuangkan nasib guru (Anonim, 2003: 10). Selanjutnya dikatakan bahwa organisasi profesi guru ini bahkan di masa lampau pernah menjadi kendaraan politik, yang justru menggunakan nasib guru untuk meraih cita-cita golongan politik dominan tertentu. Peranan PGRI di masa mendatang diharapkan lebih proaktif dalam memperjuangkan nasib serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru. Organisasi profesi ini hendaknya mampu

menunjukkan citra sebagai motor penggerak dan wadah yang menampung semua aspirasi profesionalisme guru secara mandiri (Anonim, 2003: 10).

Kualitas pendidikan yang rendah, akan berdampak menghambat program pembangunan peningkatan sumber daya manusia. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dari pihak PGRI guna menghasilkan sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Sebagai organisasi profesi guru, PGRI harus dapat menciptakan terobosan-terobosan untuk keluar dari masalah rendahnya kualitas dan profesionalisme guru. Citra PGRI pada masyarakat kita adalah bahwa organisasi ini seakan-akan hanya berorientasi kepada guru sekolah dasar dan menengah saja, meskipun terdapat juga para dosen dan profesor perguruan tinggi yang menjadi anggota PGRI. Sudah saatnya PGRI merangkul seluruh kekuatan organisasi profesi guru mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, agar dapat mempunyai daya tekan yang kuat untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, serta para guru mendapatkan penghargaan yang wajar dan setimpal dari masyarakat yang memilikinya (Tilaar, 2002: 104).

Organisasi profesi guru PGRI harus mampu menciptakan sistem pembinaan guru yang berkualitas lewat peningkatan keterampilan, pengetahuan dan wawasan tenaga pendidik. Organisasi ini diharapkan menjadi motor bagi lahirnya ilmu pendidikan yang otonom dan inovatif, sehingga membantu pengembangan profesional profesi guru di era global ini (Tilaar, 2002: 106). Dikatakan pula, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh PGRI dalam

pembinaan profesionalisme guru, antara lain guru harus mempunyai jiwa kepemimpinan dan serius memperhatikan pendidikan; guru harus berkemampuan menentukan prioritas pekerjaan yang diperlukan; guru harus menghindari ketidak-jujuran yang tidak hanya terkait dengan materi, tetapi juga waktu jam kerja dan proses belajar mengajar (Tilaar, 2002: 106).

Citra guru di Indonesia dewasa ini memang dalam keadaan terpuruk. Keterpurukan profesi guru ini merupakan penghalang bagi kebangkitan kehidupan berbangsa dan bertanah air. Terpuruknya profesi guru disebabkan oleh berbagai hal, antara lain telah terjadi anomali mengenai status profesi guru, karena kesalahan masyarakat sendiri yang meninggikan dan sekaligus mencampakkan profesi guru sebagai profesi terhormat di dalam masyarakat. Selanjutnya, merosotnya profesi guru lebih dikarenakan lembaga organisasi profesi guru, seperti PGRI, lemah sehingga tidak menopang perbaikan profesi guru, baik dari segi kualitas pengabdian maupun di dalam kualitas penghargaan pemerintah dan masyarakat terhadap profesi guru. Sebagai organisasi profesi, PGRI perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan apresiasi orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap profesi guru. Guru yang lemah, guru yang kurang gizi jasmani dan rohani, akan menghasilkan generasi penerus yang kurang gizi juga. Sebaliknya, guru yang mendapat penghargaan serta kesejahteraan yang sepadan dengan pengabdian kepada masyarakat akan menjadi salah satu motor penggerak kemajuan masyarakat menuju Indonesia yang lebih baik (Tilaar, 2002: 92-93, 106).

Selaku seorang guru, penulis memberikan sumbang saran agar sebagai organisasi profesi guru PGRI akan lebih proaktif dalam memperjuangkan nasib serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru. Organisasi PGRI perlu diperluas, dihilangkan citra bahwa hanya milik guru sekolah dasar dan menengah saja, namun mencakup mulai dari guru taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Dengan demikian, organisasi ini akan menjadi lebih kuat dan lebih mempunyai daya tekan yang dapat melobi DPR maupun lembaga masyarakat lainnya, sehingga terbentuk opini umum betapa besarnya peranan pendidikan, melalui profesi guru, dalam membangun masyarakat Indonesia baru. Adanya organisasi PGRI yang kuat akan mempunyai kekuatan politis serta kemampuan melindungi dengan memberikan sanksi terhadap anggotanya untuk mempertahankan dan mengembangkan standar profesi guru. Organisasi profesi PGRI juga diharapkan menjadi inisiator bagi lahirnya ilmu pengetahuan pendidikan yang otonom dan inovatif, sehingga membantu pengembangan profesional profesi guru dalam menghadapi era globalisasi. Profesi guru merupakan pekerjaan intelegen yang berhak dihargai oleh masyarakat sebagai suatu profesi terhormat, serta mempunyai kewajiban dan memperoleh imbalan yang sesuai seperti profesi lainnya. Organisasi PGRI di masa mendatang dituntut untuk lebih memperjuangkan hak dan kewajiban, meningkatkan kesejahteraan, serta meningkatkan citra profesional dari para guru anggotanya. Organisasi profesi ini sangat diharapkan dapat menjadi dinamisor dan lokomotif dalam perbaikan profesionalisme

guru dalam rangka perbaikan sistem pendidikan nasional menuju pembangunan masyarakat Indonesia yang lebih baik di masa mendatang.

Penutup

Kualitas dan profesionalisme guru dalam melaksanakan profesinya umumnya masih rendah. Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme harus diupayakan peningkatan kualifikasi, kompetensi, profesionalisasi, serta kesejahteraan guru. Guru yang profesional selalu meningkatkan kemampuannya, pengetahuan dan wawasannya secara berkelanjutan. Profesi guru merupakan profesi terhormat, mandiri dan memiliki komunitas profesional yang dinamis.

Peranan PGRI, sebagai organisasi profesi guru, diharapkan lebih proaktif dalam memperjuangkan nasib serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru. Organisasi profesi ini diharapkan menjadi sarana kekuatan untuk tujuan profesi guru dan perbaikan hidup anggotanya. Organisasi PGRI ini juga dituntut untuk menunjukkan citra sebagai motor penggerak dan wadah yang menampung semua aspirasi profesionalisme guru. Diharapkan juga PGRI dapat memfasilitasi dan memotivasi kepada para guru anggotanya untuk terus menerus meningkatkan profesionalisme dan menambah wawasan keilmuan, kualitas dan kualifikasinya

Daftar Pustaka

- Anonim. (1992). Meningkatkan profesionalisasi tenaga pendidikan khususnya memantapkan jabatan fungsional guru. *Jurnal Pendidikan* vol 7: 1-53.
- Anonim. (2003). PGRI harus bisa ciptakan sistem pembinaan bermutu. *Skh Bernas* 14 Maret 2003, hlm: 10.
- Badarudin, A. (2002). Profesionalisme guru. *Berkala Ilmu Pendidikan* vol 24: 36 – 42.
- Najid, A. *Pola Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup*. Surabaya: Penerbit Surabaya Intellectual Club.
- Salim, A. (2003). Paradigma Guru: Dari PNS ke guru kontrak. *Skh Kompas* 11 Maret 2003, hlm: 5.
- Sukmadinata, N. S. (1992). Peningkatan mutu pendidikan guru. *Jurnal Pendidikan* vol 7: 54-66.
- Suparno, P. (2003). Kepala sekolah dan reformasi pendidikan. *Skh Bernas* 6 Maret 2003, hlm: 4.
- Suryono, A. R. (2002). Mengenal kurikulum berbasis kompetensi. *Media Pendidikan* vol 12: 14 – 18.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widayati, S. (2002). *Reformasi Pendidikan Dasar*. Jakarta: Grasindo.

